

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejak lama Indonesia telah menjalankan berbagai sektor industri baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Sebagian dari itu merupakan perusahaan Multinasional yang telah menanamkan modalnya dan berada di Indonesia selama puluhan tahun. Salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia adalah PT Citra Cakra Murdaya yang dimiliki oleh Hartati Murdaya. Perusahaannya tersebut membawahi beberapa pabrik-pabrik yang mengelola dan memproduksi barang-barang olahraga merk ternama dunia yang salah satunya adalah Nike. Perusahaan tersebut sebagai apparel juga telah memberikan investasi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

Pada bulan Juni 2007, dua pabrik yang berada dibawah naungan Hartati Murdaya yaitu PT HASI dan PT NASA, telah terjadi konflik tentang pemutusan kontrak order pembuatan sepatu Nike dengan perusahaan pemilik tunggal merk Nike tersebut yaitu Nike Inc AS. Masalah itu menjadi perhatian pemerintah Indonesia itu sendiri untuk turut dalam penyelesaian konflik tersebut.

Maka dari itu, penulis mengambil judul *“Peran Pemerintah Indonesia*

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara produsen apparel Nike terbesar, termasuk diantaranya sepatu, pakaian dan perlengkapan olah raga. Perusahaan Nike AS memulai kerjasama dengan perusahaan di Indonesia dan telah beroperasi dengan aktif di Indonesia sejak 1989 dan saat ini lebih dari 115.000 karyawan kontrak di Indonesia bekerja di pabrik-pabrik kontrak mengerjakan produk Nike.

Nike. Inc merupakan contoh ideal perusahaan multinasional yang bekerja berdasarkan prinsip globalisasi. Perusahaan ini menyerahkan semua pengerjaan produk sepatu dan perlengkapan olahraganya kepada pihak ketiga (outsourcing). Pada tahun 1970-an, Nike memusatkan basis produksinya di Jepang yang pada saat itu upah buruhnya lebih murah dibanding di AS. Pada 1982, 68 persen produk sepatu Nike dihasilkan di Korea dan Taiwan. Akibat upah buruh di kedua negara itu juga semakin mahal, pada dekade berikutnya Nike merelokasi perusahaan subkontraknya ke Indonesia, China, dan Vietnam.¹

PT Citra Cakra Murdaya merupakan salah satu pabrik Subkontrak dari NIKE Inc AS yang berada di Indonesia, dimana perusahaan tersebut memiliki beberapa anak perusahaan yang dua diantaranya adalah PT HASI dan PT Nasa yang merupakan pabrik-pabrik terbesar dari anak perusahaan PT CCM yang lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi sepatu dengan merk asing yang disebut dengan NIKE. Sebagai perusahaan besar Nike Inc memiliki

¹ *Globalisasi, buruh, dan nike* (diakses Rabu 25 Juli 2007, 09.00 WIB); didapat dari <http://www.transplantasi.com/Globalisasi+buruh+dan+nike/zahidavat>

arti penting yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas di Indonesia khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.²

Pada tahun 2001, produk Nike berasal dari lebih dari 700 pabrikan, dengan 500 ribu pekerja di 51 negara. Pada saat itu, Nike hanya memiliki pegawai langsung sebanyak 22 ribu yang mayoritasnya di berada di AS. Pada Februari 2007, Nike memiliki 28 ribu pegawai tetap dan 800 ribu buruh di 652 pabrik subkontrak (Nike FY05-06 Corporate Responsibility Report).³

Keberadaan Nike di Indonesia menjadi sangat *esensial*, hal ini dikarenakan Nike Inc memberikan peluang untuk tumpuan utama penyerapan tenaga kerja dan bertambahnya *investasi* yang mencapai 60 juta pasang dengan nilai ekspor sebesar *700 juta dolar AS* per tahun. Dengan begitu, jumlah pengangguran yang seperti disebutkan dari data BPS di atas dapat berkurang dengan bekerjanya para pengangguran di perusahaan Nike dan mitra bisnisnya Hartati Murdaya yang membawahi PT HASI dan PT NASA tersebut.⁴

Seiring kerjasama antara PT NIKE dan PT CCM di Indonesia dalam bidang perdagangan sepatu olah raga dengan label Nike, pada tanggal 2 Juni sampai dengan Juli 2007 terjadi sengketa perjanjian dimana PT. Nike Inc menyatakan akan memutuskan atau menghentikan kontraknya dengan kedua perusahaan karena terdapat sejumlah penyimpangan atas kesepakatan kontrak yang dilakukan dengan PT. HASI dan PT. NASA dikarenakan mereka

² *Kasus Nike: Limbung di Tengah Deru Globalisasi* (diakses 30 Juli 2007); didapat dari http://www.kompas.co.id/07/1/2007/faisal_hasri/Kasus-Nike-Limbung-di-Tengah-Deru-Globalisasi

menganggap pabrik-pabrik tersebut tidak sesuai lagi dengan standar. Hal tersebut yang kemudian menyulut demonstrasi dari kalangan pekerja atau para buruh Nike dan juga pernyataan dari pemilik perusahaan Hartati Murdaya yang mengecam keputusan itu.⁵

Ribuan buruh dua perusahaan, PT Hardaya Aneka Shoes Industry (HASI) dan PT Naga Sakti Parama Shoes Industry (NASA), melakukan demonstrasi di depan Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) di kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jakarta Selatan. Hal itu terjadi karena buruh tersebut menuntut Nike Inc tetap mempertahankan kontrak kerja dengan PT. HASI dan PT. NASA dalam waktu tidak terbatas, tetap memberikan order sesuai dengan kapasitas kedua perusahaan, serta mendesak pemilik Nike Inc, Phillippe Knight, memahami tuntutan para buruh.⁶

Nike berencana menghentikan pemesanan sepatu karena selama itu, rata-rata 10 % dari total sepatu yang diproduksi setiap bulan telah ditolak (reject) dan dikembalikan Nike Inc. Padahal, Nike telah mematok ambang batas maksimal pengembalian produk karena rusak sebanyak 2 %.⁷ Artinya dengan adanya permasalahan itu, pihak PT Nike Inc merasa dirugikan karena standarisasi pembuatan sepatu dari PT CCM tidak sesuai dengan apa yang menjadi

⁵ Hanum, *Buruh Hasi Nasa berdemonstrasi di depan gedung BEJ* (diakses sabtu 08 September 2007); didapat dari <http://www.MediaIndonesiaOnline.com/BuruhHasi+Nasa+berdemonstrasi+di+depan+gedung+BEJ/> Hanum

⁶ *Loc. Cit*

⁷ *Pemutusan order Nike terhadap HASI dan NASA* (diakses tel 27 Agustus 2007); didapat dari

permintaan dari PT Nike sendiri. Maka, hal ini *berdampak*, nasib 14.000 buruh Nike terancam di-PHK dan iklim investasi yang semakin memburuk.⁸

Pada mulanya pihak PT Citra Cakra Murdaya telah mengupayakan jalur bilateral dalam menyelesaikan konfliknya dengan pihak NIKE Inc. Jalur Bilateral yang ditempuh oleh pihak PT CCM dan NIKE tersebut misalnya pada 16 Juli 2007, PT Citra Cakra Murdaya melakukan negosiasi dengan pihak NIKE secara dua pihak langsung didalam sebuah forum tertentu untuk merundingkan tentang perpanjangan kontrak sepatu NIKE terhadap PT HASI dan PT Nasa hingga kedua pabrik tersebut mendapatkan order pengganti NIKE dari perusahaan lain, dengan kata lain jangan sampai para buruh dari kedua perusahaan tersebut ter-PHK dan menganggur. Namun, dalam negosiasi tersebut tidak didapatkan sebuah titik temu yang diharapkan, dengan kata lain pihak NIKE tetap menolak permintaan yang disampaikan oleh pihak PT Citra Cakra Murdaya dan tetap akan memutuskan kontraknya terhadap PT CCM pada akhir tahun 2007.

Maka dari itu, pemerintah merasa harus turun tangan dalam penyelesaian konflik tersebut mengingat cukup banyaknya jumlah para buruh yang terancam ter-PHK dan demi menyelamatkan kepentingan nasional. Posisi pemerintah Indonesia didalam masalah tersebut sangatlah *dilamatis* karena pemerintah

masih belum pasti haruskah bela NIKE atau bela PT CCM dalam masalah tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah biasanya ditunjukan untuk memberikan gambaran obyektif suatu fenomena tertentu. Penelitian ini ditunjukan untuk memberikan gambaran obyektif atas apa yang terjadi berkaitan dengan fakta pertikaian Hartati Murdaya dengan Nike Inc.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka muncul permasalahan, **“Bagaimana Peran Pemerintah Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian antara Nike Inc milik AS dengan PT Citra Cakra Murdaya?”**

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk membantu memberikan penjelasan secara ilmiah, penulis akan menggunakan kerangka dasar berfikir berdasarkan **Teori Resolusi Konflik**.⁹

Berdasarkan gagasan Hugh Miall tentang Resolusi Konflik. Konflik secara konseptual yaitu perwujudan dan pelaksanaan beraneka pertentangan

⁹ Penjelasan yang lebih lengkap mengenai pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian konflik secara damai serta beberapa gagasan tentang Resolusi Konflik dapat dibaca selengkapnya dalam Hugh Miall, Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : menyelesaikan, mencegah, mengelola dan mengubah konflik* : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

antar dua pihak, yang dapat merugikan dua orang atau bahkan golongan besar seperti negara. Kadang-kadang konflik digunakan juga untuk menyebut pertentangan antara pandangan dan perasaan seseorang (psikologi ; percekcoakan; bentrokan)¹⁰.

Pengertian konflik yang lain adalah pengejaran tujuan saling bertentangan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Ini menunjukkan rentangan waktu yang lebih luas dan kelas perjuangan yang lebih lebar dibandingkan dengan konflik bersenjata, entah itu diikuti oleh sarana perdamaian ataupun dengan menggunakan kekuatan (sejumlah ahli teori membedakan antara pertikaian dengan kepentingan yang dapat dinegosiasikan dan dapat diatasi dengan kompromi, dan konflik yang lebih dalam melibatkan kebutuhan manusia dan hanya dapat diselesaikan dengan menghilangkan penyebab tersembunyinya)¹¹.

Resolusi Konflik adalah istilah Komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar, akan diperhatikan dan diselesaikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa prilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan, dan struktur konfliknya telah diubah.¹²

Dalam menjelaskan Resolusi Konflik, Hugh Miall, Et al menawarkan beberapa pendekatan dan cara penyelesaian konflik secara damai. Disini, penulis akan mengadopsi salah satu gagasannya tentang "Penyelesaian Konflik Multi Jalur".

¹⁰ BN Marbun, SH, *Kamus Politik* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal 341

1. Jalur I : Negosiasi, menjaga perdamaian, arbitrase, dukungan perdamaian, mediasi dengan otot (kekuatan). Dominasi kekuasaan yang dipertukarkan dan kekuasaan untuk mengancam.
2. Jalur II : Jasa yang baik, konsiliasi, mediasi murni, penyelesaian masalah dominasi kekuasaan integratif dan kekuasaan yang dipertukarkan.
3. Jalur III : Konstituensi damai didalam konflik, membangun kohesi sosial, landasan yang sama. Dominasi kekuasaan integratif dan kekuasaan yang dipertukarkan.¹³

Sampai saat ini upaya dan peran yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik antara Nike Inc dan PT Citra Cakra Murdaya sebatas penerapan pada Jalur II yaitu dengan melalui cara *mediasi*. Karena konflik tersebut melibatkan konflik antar negara yaitu NIKE milik AS dan PT Citra Cakra Murdaya milik Indonesia, bukan sekedar antar masyarakat.

Pada Jalur II tersebut, mediasi dilakukan bisa melalui sebuah forum yang disebut *Lokakarya* yaitu sekelompok atau beberapa pihak tertentu yang berkumpul bersama dengan tujuan untuk mencari penyelesaian atau solusi dari masalah yang mereka alami dan untuk kepentingan bersama. Terkait dengan konflik Nike dan PT CCM tersebut bahwa pihak-pihak terkait dalam konflik berkumpul dan berbicara bersama mengenai solusi masalah tersebut dimana dua pihak yang berkonflik tersebut juga menvertakan peran pemerintah Indonesia

yang berperan sebagai pihak ketiga sekaligus menjadi penengah atau mediator untuk penyelesaian konflik kedua pihak dan memberikan solusi maupun kebijakan yang terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak tersebut.

Melihat ruang lingkup Resolusi Konflik dan mengakhiri konflik kekerasan, Vayrinen berpendapat bahwa konflik secara inharen bersifat dinamis dan penyelesaian konflik harus terlihat dengan pergeseran hubungan yang kompleks :

“Banyak teori konflik mempertimbangkan persoalan, aktor dan kepentingan sebagai sesuatu yang sudah ada dan berdasarkan landasan ini melahirkan usaha untuk menemukan sebuah solusi guna meredakan atau menghilangkan kontradiksi antar mereka. Meskipun demikian, persoalan aktor dan kepentingan selalu berubah setiap waktu sebagai akibat dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Bahkan jika berhubungan dengan aspek non-struktural konflik, seperti prefensi aktor, tidak ada jaminan bagi asumsi stabilitas yang biasanya dibuat dalam pendekatan teoritis permainan untuk studi konflik. Faktor situasi baru, pengalaman pembelajaran, interaksi dengan lawan dan pengaruh-pengaruh lainnya akan memperlihatkan bahwa prefensi aktor bukan sesuatu yang given”¹⁴

¹⁴ Ibid, hal 249

Tujuan penyelesaian konflik adalah menransformasi konflik dengan kekerasan yang ada atau berpotensi untuk ada dan menjadi proses perubahan sosial dan politik yang penuh damai (tanpa kekerasan).

Dalam proses *mediasi* terdapat adanya unsur yang biasanya dengan melibatkan berbagai jenis badan yang berbeda (Organisasi Internasional, negara, dsb). Untuk menangani kelompok yang berbeda, dan kelompok lainnya yang mempunyai beragam bentuk, daya tahan dan tujuan. Mediasi biasanya penting dalam sebuah tahapan ketika paling tidak sejumlah pihak-pihak yang bertikai harus menerima kenyataan bahwa melanjutkan konflik tampaknya tidak akan membuat mereka mencapai tujuan.¹⁵

Fungsi yang paling penting dari *mediator* adalah untuk memulihkan komunikasi diantara para pihak yang bersengketa, mendinginkan suasana, menyelidiki keadaan di wilayah konflik dan jika perlu memberikan beraneka jasa kepada pihak yang berkonflik.¹⁶

Berkaitan hal ini konflik yang terjadi antara NIKE dan PT Citra Cakra Murdaya memperoleh campur tangan dari pemerintah Indonesia sebagai sarana mediasi penyelesaian konflik antara kedua belah pihak yang berkonflik tersebut. Sebagai langkah awal, pemerintah membentuk *Tim Crisis Center (pusat krisis)* yang terdiri atas perwakilan beberapa departemen (interdep) untuk menjadi mediator antara PT Central Cakra Murdaya (CCM Group) dengan Nike Inc

Selanjutnya setelah membentuk Tim tersebut, pemerintah mengadakan pertemuan *Country Manager Nike* di Indonesia pada tanggal 18 Juli 2007 di kantor Departemen Perdagangan. Pertemuan itu diikuti Menakertrans Erman Suparno, Mendag Mari Pangestu dan Kepala BKPM M Luthfi. Pertemuan tersebut untuk memfasilitasi apa sebenarnya permasalahan yang terjadi sehingga Nike menghentikan ordernya di 2 pabrik milik Central Cipta Murdaya yakni PT Hardaya Aneka Shoes Industry (HASI) dan Nagasakti Paramashoes Industry (NASA).¹⁷

Pada pertemuan mediasi tersebut ada tiga alternatif cara atau opsi yang diajukan pemerintah untuk penyelesaiannya. Materi pembahasannya adalah mendalami tiga alternatif tersebut serta langkah yang diambil juga sekitar tiga alternatif tersebut. Dari ketiga alternatif tersebut bisa satu, bisa kombinasi, dan sebagainya.¹⁸

Presiden Yudhoyono sendiri sebelumnya juga telah menginstruksikan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menakertrans, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk segera melakukan mediasi tersebut untuk mencari solusi masalah itu. Salah satu langkah yang diambil adalah menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Untuk itu, diperlukan pengertian bersama agar pemerintah dapat mengambil jalan keluar dan memfasilitasi kondisi hubungan bisnis antara NIKE,

¹⁷ *bahas nasib karyawan Pemerintah bertemu Nike* (diakses 12 Agustus 2007); didapat dari http://www.detik.com/05/7/07/bahas_nasib_karyawan_Pemerintah_bertemu_Nike

¹⁸ *Dalami empat alternatif* (diakses 25 Juli 2007); didapat dari <http://www.Indoposonline.com/Dalami+empat+alternatif>

NASA dan HASI. Lewat peran aktif pemerintah itu, diharapkan tercipta win-win solution.¹⁹

Melalui mediasi tersebut, pemerintah menawarkan tiga opsi pilihan terhadap perusahaan sepatu NIKE Inc. Opsi pertama yang ditawarkan oleh pemerintah adalah Nike memperpanjang kontrak dengan PT Hardaya Aneka Shoes Industry serta PT Naga Sakti Parama Shoes Industry. Kedua adalah

negosiasi antara pihak Nike dan dua perusahaan milik Hartati Murdaya terus dilakukan mengenai harga produksi. Ketiga adalah PT CCM harus segera

mengembangkan produk nasional untuk memperkuat ekspor.²⁰ Pasca mediasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut diatas, maka konflik antara NIKE dan Citra Cakra Murdaya menemui titik terang yaitu Nike menawarkan

perpanjangan produksi di PT HASI hingga Juli 2008 dan PT NASA hingga Juli 2009 dengan peningkatan produksi yang jumlahnya lebih tinggi dari sekarang dari setiap pabrik.²¹

Pemerintah sebagai aktor nasional juga berusaha untuk lebih mengutamakan kepentingan politiknya. Dalam hal ini, pemerintah menganggap keberadaan para investor di Indonesia sangatlah penting mengingat dengan adanya Penanam Modal Asing di Indonesia berarti secara tidak langsung akan menambah devisa atau income Negara. Apalagi Nike juga berkomitmen untuk

¹⁹ Loc. Cit

²⁰ Pemerintah Meminta Nike Memperpanjang Kontrak (diakses 14 Agustus 2007); didapat dari

²¹ tiga menteri mediator kasus nike (diakses Jumat, 20 Juli 2007); didapat dari <http://www.liputan6.com/Pemerintah-Meminta-Nike-Memperpanjang-Kontrak>

<http://www.jawapos.com/tiga+menteri+mediatori+kasus+nike>

memperpanjang order terhadap PT HASI selama 12 bulan dan PT Nasa selama 24 bulan.²²

Pemerintah telah meminta keputusan Nike jika menghentikan pesanan jangsan sampai menyebabkan 15.000 buruh yang bekerja di-PHK. Apabila Nike tetap menghentikan pesanan harus dilakukan cara agar kedua pabrik itu bisa mendapat order dari pihak lain sehingga pekerjaanya tidak menganggur. Hasil dari mediasi pemerintah tersebut memberikan dampak yang baik bagi PT Citra Cakra Murdaya sehingga NIKE masih tetap berinvestasi di Indonesia dan disisi lain ribuan buruh PT HASI dan PT NASA tidak jadi di-PHK. Maka, dalam hal ini pemerintah menjadi pihak yang *netral* tanpa harus memojokkan salah satu pihak yang berkonflik. Pemerintah menilai, jika hal tersebut tidak diselesaikan bisa berdampak kurang baik bagi iklim investasi di perekonomian Indonesia.²³

F. Jangkauan penelitian

Kerjasama industri dan perdagangan antara Nike Inc milik Amerika Serikat dengan PT Citra Cakra Murdaya telah terjalin sejak lama. Disamping itu, berbagai merk terkenal yang dikeluarkan Amerika serikat telah menjadi sebuah ikon tertinggi dalam setiap industri maupun produk olahraga dunia. Misalnya merk-merk seperti adidas, ASICS, FILA, Lotto, Kappa, Mizuno, New Balance, Nike, Pentland, Puma, Reebok dan Umbro.

²² Kasus Nike Pasiko bisnis. (diakses Kamis 26 Juli 2007); didapat dari <http://www.bisnis.com/Kasus Nike>

Sehubungan dengan itu, jangkauan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebatas penyelesaian konflik antara kedua pihak tersebut dan peran pemerintah Indonesia sendiri dalam posisinya sebagai penengah antara Nike Inc dan PT Citra Cakra Murdaya dalam kasus sepatu Nike di Indonesia tersebut pada awal tahun 2007 sampai akhir tahun 2007.

G. Hipotesa

Dari permasalahan tersebut, maka hipotesa yang dapat diambil adalah Pemerintah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik NIKE Inc dan PT Citra Cakra Murdaya yaitu dengan membentuk Tim Crisis Center melalui fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan juga berperan sebagai aktor nasional yang memiliki kewajiban melindungi hak buruh sebagai rakyatnya serta memiliki kewenangan dalam mengatur PMA yang ada di dalam negeri melalui Undang-undang, yang selanjutnya konflik terselesaikan dengan direalisasikan sebuah kesepakatan berupa perpanjangan kontrak oleh NIKE Inc kepada PT HASI dan PT NASA hingga batas waktu yang ditentukan.

H. Metode penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber-sumber dari beberapa literature, surat kabar, jurnal, artikel dan beberapa data dari situs-situs di internet. Metode pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan literature yang ada (data sekunder).

Melalui studi kepustakaan ini penulis membaca dan menganalisa berbagai literatur yang membahas perdagangan di bidang industri alas kaki yakni antara perusahaan Nike milik Amerika Serikat PT Citra Cakra Murdaya dan perusahaan - perusahaan yang bernaung dibawahnya guna mendapatkan data-data mengenai penyebab timbulnya konflik-konflik diantara kedua perusahaan tersebut serta bagaimana kebijakan Pemerintah dalam hal ini

I. Sistem Penulisan

BAB I : Memuat pendahuluan yaitu alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, sistematika penulisan dan kerangka penulisan.

BAB II : Membahas tentang profil NIKE Inc dan PT Citra Cakra Murdaya serta Latar Belakang Munculnya Konflik Antara NIKE dan Citra Cakra Murdaya.

BAB III : Membahas tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan para buruh Nike Indonesia dengan berbagai bentuk tindak pelanggaran HAM Nike terhadap buruh pabriknya.

BAB IV : Membahas tentang proses penyelesaian konflik antara PT CCM dan Nike Inc, serta memaparkan peran pemerintah sebagai penengah dalam mencari solusi alternatif yang tepat antara PT Citra Cakra Murdaya dan Nike Inc untuk keberlanjutan hubungan antara kedua belah pihak sebagai investor di Indonesia. Dan terakhir, peran pemerintah sebagai aktor nasional dalam usaha menyelamatkan nasib para tenaga kerja dan